PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)

Muliani
21110079
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Regional Autonomous Regional Government demanding to be able to provide the best possible service to the public. One form of such services is to provide transparent financial information. Still the results of the audit of the financial statements are reasonable with the exception of his opinion shows that the quality of the financial statements of the area still requires continuous improvement. Factors potentially affecting both the poor quality of local government financial statements is human resources and internal control systems.

The sample was 40 employees in four units in the field of Finance and Asset Management Agency Regions. Samples were selected based on the sampling saturated. The method used in this research is descriptive and verification method using primary data. Data was collected by distributing questionnaires. Data analysis was conducted that included the classic assumption test, multiple linear analysis, correlation analysis, the coefficient of determination and hypothesis testing and using IBM SPSS v.20 program.

The results of this study indicate that the partial quality of human resources and a significant positive effect on the quality of local government financial reporting, and internal control systems and a significant positive effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: Quality of Human Resources, Internal Control Systems, Quality of Local Government Finance Report

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintah dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik di segala bidang atau pun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. Dengan adanya desentralisasi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang. Desentralisasi juga diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, yang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengolahan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku (Nogi, 2005:65-66).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Febriady, 2013).

Sumber daya manusia atau *human recources* mengandung dua pengertian. Pertama, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua,

SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat (Sony Sumarsono, 2003:4).

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita abaikan jika berbicara tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah, selanjutnya disebut SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) secara dini. SPIP akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370).

Adapun kondisi yang terjadi di lapangan yang peneliti ambil pada tanggal 30 Mei 2014 dari "Bermasalah Pengelolaan Aset, Bandung Hanya Dapat WDP dari BPK" menurut Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung mengatakan bahwa, menurut BPK banyak data aset kota yang tidak jelas luasnya. Tapi sedang kita kebut dari ratusan miliar piutang sekarang sudah menciut itu sudah progres. Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal itu Walikota Bandung Ridwan Kamil mengakui Bandung masih memiliki masalah keuangan khususnya terkait pengelolaan aset (Sumber: news.detik.com).

Kondisi lain yang terjadi di lapangan yang peneliti ambil pada tanggal 01 Februari 2012 dari "Laporan Keuangan Daerah Buruk" menurut Tahria Syafrudin sebagai Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Sejak tahun buku 2008 belum ada satu pemerintah daerah pun yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum memadai dan kurang ditaatinya ketentuan perundangan. Temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai (Sumber: bandung.bpk.go.id).

Selain itu kondisi yang terjadi di lapangan yang peneliti ambil pada tanggal 19 September 2011 dari "Wapres: Masalah SDM jadi kendala untuk tingkatkan kualitas laporan keuangan" menurut Boediono sebagai Wakil Presiden mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, minimnya SDM yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan dengan kualitas tinggi menjadi kendala utama rendahnya kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah (Sumber: nasional.kontan.co.id).

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperkuat oleh I Gede dan Ni Made (2012), Yosefrinaldi (2013) dan Wiwik (2010), Sedangkan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperkuat oleh Susilawati (2014), Gerry (2013) dan Tuti (2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)".

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
2. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah, maka enelitian ini dimaksudkan oleh penulis adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan yang terjadi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memecahkan masalah bahwa kualitas sumber daya manusia lebih ditingkatkan dan lebih maksimal dan sistem pengendalian intern lebih memadai agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pun dapat lebih berkualitas dan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem pengendalian intern yang memadai.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:8) sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

> “Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu”.

2.1.1.1 Elemen-elemen Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2009:16), elemen-elemen pengembangan sumber daya manusia terdiri dari:

> ”1. Pendidikan
>
> Pendidikan formal di dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

2. Pelatihan
   Merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang".

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mahmudi (2010:20) sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:
"Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannnya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan".

2.1.2.1 Komponen Sistem Pengendalian Intern

Model *COSO* (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)* terdiri atas lima komponen sistem pengendalian intern dalam Sekar dan Puspa (2013:59) adalah sebagai berikut:
"1. Lingkungan pengendalian
2. Penentuan risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan".

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Syofyan Syafri Harahap (2009:146) kualitas laporan keuangan adalah:
"Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan".

2.1.3.1 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Dadang Suwanda (2013:96), Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
"a. Relevan
b. Andal
c. Dapat dibandingkan
d. Dapat dipahami".

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota sangat tergantung pada laporan atas kompilasi puluhan atau bahkan ratusan SKPD, yang ada di pemerintah daerah yang bersangkutan. Bisa dibayangkan apabila ada beberapa SKPD yang lalai sehingga belum menyelesaikan laporan keuangan maka yang terjadi Laporan Keuangan Pemerintah daerah mengalami kendala dalam penyelesaiannya (Dadang Suwanda, 2013:137).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dituntut kemandirian SKPD sebagai suatu entitas dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan atas alokasi keuangan yang diterimanya sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) dalam APBD (Dadang Suwanda, 2013:137).

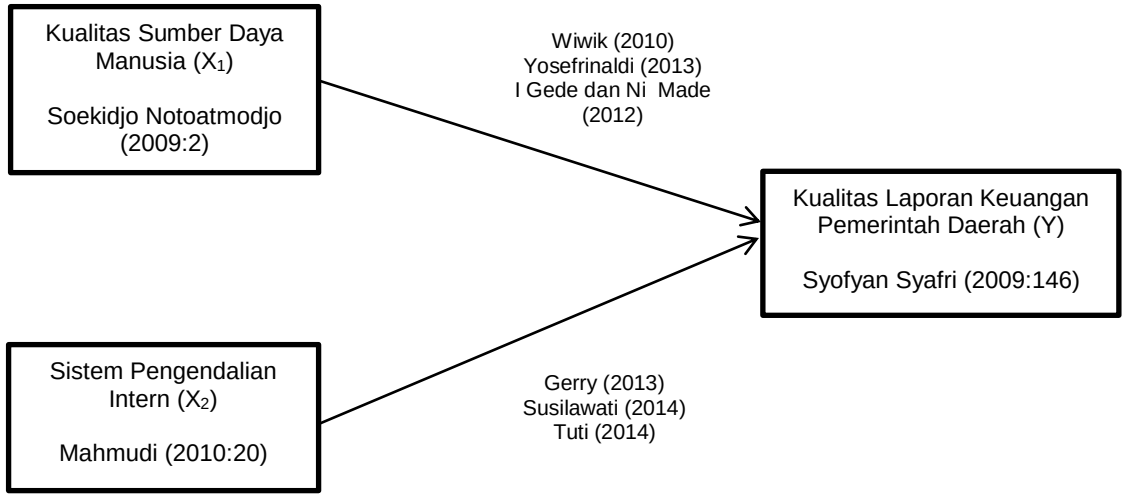
Hal pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Wahyono (2004:12) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan), disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya.

Sumber daya manusia yang pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Di sini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan dan ketepatwaktuan).

Hal kedua adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. Sistem pengendalian intern akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370).

Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan pengendalian intern akuntansi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu (Yosefrinaldi, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:146) mengungkapkan bahwa:

"Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan".

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2007:11) keterkaitan sistem pengendalian inten terhadap kualitas laporan keuangan adalah:

"Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) " Hipotesis merupakan jawaban sementara."

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:32) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut:

"Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan".

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2), pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis".

Metode penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode deskriptif dan verifikatif tersebut digunakan untuk menguji kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010:30) pengertian desain penelitian adalah sebagai berikut:

"Desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu".

Menurut Sugiyono (2008:13) menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan seperti teori sebagai berikut:

"1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan".

3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2010:38) mendefinisikan variabel penelitian adalah:

"Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas / *Independent* (Variabel X_1 dan $X_{2)}$

   Definisi variabel bebas menurut Sugiyono (2010:33) adalah sebagai berikut:

   "Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terkait (dependen)".

   Variabel bebas dalam penelitian ini kualitas sumber daya manusia (X_1) dan sistem pengendalian intern (X_2).

2. Variabel Terikat / *Dependent* (Variabel Y)

   Definisi variabel terikat menurut Sugiyono (2010:39) adalah sebagai berikut:

   "Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

   Adapun variabel terikat atau variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunaan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sebagai berikut:

"Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah pegawai di empat bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

3.5 Alat Ukur Penelitian

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Juliansyah Noor (2011:132), mendefinisikan bahwa:

"Validitas/kesahihan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur".

Dalam hal ini Sugiyono (2012:188) menyatakan hal sebagai berikut:

"Teknik korelasi untuk menentukan validitas item sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Dan item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi menunjukan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula".

Metode korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pearson product moment.* Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien korelasi r = 0,3, jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan "Tidak Valid".

3.5.2 Uji Reabilitas

Menurut Juliansyah Noor (2011:131), uji reabilitas adalah:

"Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan".

Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrumen. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji reabilitas adalah *Split Half Method* (*Spearman–Brown Correlation*) Tehnik Belah Dua.

Nilai koefisien reabilitas dikatakan andal apabila bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,7. Adapun kriteria penilaian uji reabilitas yang dikemukakan oleh Chris Barker et al. (2002:70).

3.5.3 Uji MSI

Menurut Hays dalam Umi Narimawati, dkk. (2010:47) menyatakan bahwa:

"Data yang didapatkan dari kuesioner merupakan data ordinal, sedangkan untuk

menganalisis data diperlukan data interval, maka untuk memecahkan persoalan ini perlu ditingkatkan skala pengukurannya menjadi skala interval melalui *Method of Successive Interval*".

3.6 Penarikan dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2010:80) mengemukakan mengenai populasi adalah sebagai berikut:

"Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

2. Sampel

Pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut:

"Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian".

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah cara pengambilan sampel dengan mengambil semua anggota populasi menjadi sampel. Sampel yang digunakan adalah keseluruhan populasi yaitu pegawai di empat bidang yaitu bidang anggaran, bidang perbendaharaan, pemberdayaan aset dan bidang akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang berjumlah 40 orang.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2009:6), metode survei adalah sebagai berikut:

"Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara".

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:40) mendefinisikan kuesioner sebagai berikut:

"Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini".

3.8 Metode Pengujian Data

3.8.1 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif (kualitatif) dan verifikatif (kuantitatif).

1. Analisis Deskriptif (Kualitatif)

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria penilaian sebagai berikut:

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal} = X\ 100\ \%$$

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Sehingga pengkategorian skor jawaban responden untuk masing-masing item penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Skor Jawaban Responden

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20.00% - 36.00%	Tidak Baik
2	36.01% - 52.00%	Kurang Baik
3	52.01% - 68.00%	Cukup
4	68.01% - 84.00%	Baik
5	84.01% - 100%	Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati (2007:85)

2. Analisis Verifikatif (Kuantitatif)

Analisis kuantitatif menurut Sugiyono (2010:14) adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian kuantitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis, dan membuat laporan peneliti secara mendetail".

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dari variabel X_1 dan X_2, peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif dalam penelitian ini.

Adapun langkah-langkah analisis kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas Data Residual

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

a) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.

b) Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal

Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat.

Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

a) Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.

b) Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesame variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula.

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)*.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gujarati (2004:406) heteroskedastisitas adalah:

"Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen)".

3. Analisis Statistik

a. Analisis Regresi Linier Berganda (Multipel)

Menurut Umi Narimawati (2008:5) analisis regresi linier berganda yaitu:

"Suatu analisisa sosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator.Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber: Sugiono (2009:192)

Keterangan:

Y = Variabel tak bebas (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah)
a = Bilangan berkonstanta
b_1, b_2 = Koefisien arah garis
X_1 = Variabel bebas (kualitas sumber daya manusia)
X_2 = Variabel bebas (sistem pengendalian intern)

b. Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

Besarnya pengaruh masing-masing komponen variabel bebas secara parsial, yaitu kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap variabel tidak bebas yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dengan menggunakan korelasi parsial.

Tabel 3.2
Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Keeratan Hubungan
0,00 – 0,199	Korelasi lemah/Tidak ada korelasi
0,20 – 0,399	Korelasi rendah
0,40 – 0,599	Korelasi sedang
0,60 – 0,799	Korelasi kuat
0,80 – 1,00	Korelasi sangat kuat

c. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antar variabel kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung.

Kuat atau tidaknya hubungan antara ketiga variabel dapat dilihat dari beberapa kategori koefisien korelasi mempunyai nilai $0 \leq R \leq 1$ dimana:

a. Apabila R = 1, maka korelasi antara ketiga variabel dikatakan sempurna; dan
b. Apabila R = 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada hubungan sama sekali.

d. Analisis Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut**:**

$$Kd = r2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi atau Seberapa Jauh Perubahan Variabel Y Dipergunakan oleh Variabel X
r 2 = Kuadrat Koefisien Korelasi
100% = Pengkali yang menyatakan dalam persentase

3.8.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Andi Supangat (2007:293) yang dimaksud dengan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

"Salah satu cara dalam statistika untuk menguji "parameter" populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu".

1. Pengujian Secara Parsial

Melakukan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, hipotesisnya sebagai berikut:

H01; $\rho = 0$, kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
H11; $\rho \neq 0$, kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
H02; $\rho = 0$, sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
H12; $\rho \neq 0$, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengakuannya yaitu sebagai berikut:

H0 ditolak apabila t hitung> t tabel ($\alpha = 0,05$)

Jika menggunakan tingkat kekeliruan ($\alpha = 0,01$) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

a) Jika t hitung ≥ t tabel maka Ho ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
b) Jika t hitung ≤ t tabel maka Ho ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

1. Kualitas Sumber Daya Manusia pada DPKAD

Berdasarkan tabel 1 hal (20), dari satu variabel yaitu kualitas sumber daya manusia (X_1) terdapat dua dimensi didalamnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Dari dua dimensi tersebut maka akan mendapatkan persenan skor aktual untuk variabel kualitas sumber daya manusia (X_1) yaitu sebesar 81,95% dalam kategori baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 18,05%. Artinya kualitas sumber daya manusia masih minim dan rendah. Hal ini sama dengan fenomena yang menyebutkan bahwa minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan dengan kualitas tinggi menjadi kendala utama rendahnya kualitas laporan keuangan.

2. Sistem Pengendalian Intern pada DPKAD

Berdasarkan tabel 2 hal (20), dari variabel sistem pengendalian intern (X_2) terdapat lima dimensi didalamnya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan. Dari lima dimensi tersebut maka akan mendapatkan persenan skor aktual untuk variabel sistem pengendalian intern (X_2) yaitu sebesar 78,71% dalam kategori baik, namun masih ada *gap* sebesar 12,29%. Artinya sistem pengendalian intern masih belum memadai. Hal ini sama dengan fenomena yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang belum memadai.

3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada DPKAD

Berdasarkan tabel 3 hal (20), dari satu variabel yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) empat dimensi didalamnya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari empat dimensi tersebut maka akan mendapatkan persenan skor akrual untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) yaitu sebesar 84,06% dalam kategori baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 15,94%. Artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih rendah. Hal ini sama dengan fenomena yang menyebutkan bahwa masih memiliki masalah keuangan khususnya terkait pengelolaan aset dengan mendapat prediktif opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

4.1.2 Pengujian Alat Analisis

4.1.2.1 Uji Validitas

1. Uji Validitas Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1)

Berdasarkan tabel 4 hal (20), hasil uji validitas terhadap 10 butir pertanyaan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) diperoleh semua item memiliki nilai koefisien korelasi r>0,30, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan valid. Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa semua item kuesioner 1 sampai 10 variabel kualitas sumber daya manusia (X_1) telah memiliki persyaratan validitas dan tepat untuk digunakan sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data mengenai kualitas sumber daya manusia (X_1).

2. Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern (X_2)

Berdasarkan tabel 5 hal (21), hasil uji validitas terhadap 10 butir pertanyaan variabel Sistem Pengendalian Intern (X_2) diperoleh semua item memiliki nilai koefisien korelasi r>0,30, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan valid. Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa semua item kuesioner 11 sampai 20 variabel sistem pengendalian intern (X_2) telah memiliki persyaratan validitas dan tepat untuk digunakan sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data mengenai sistem pengendalian intern (X_2).

3. Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan tabel 6 hal (21), hasil uji validitas terhadap 10 butir pertanyaan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) diperoleh semua item memiliki nilai koefisien korelasi r>0,30, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan valid. Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa semua item kuesioner 21 sampai 30 variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) telah memiliki persyaratan validitas dan tepat untuk digunakan sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

4.1.2.2 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kekonsistenan tanggapan responden terhadap item pernyataan kuesioner berdasarkan pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan. Uji Reabilitas dilakukan dengan metode *Split half*.

Berdasarkan tabel 7 hal (21), hasil nilai koefisien reabilitas untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai acuan, dapat dipercaya (reliabel) dan andal. Dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara berulang-ulang dalam waktu berbeda dan responden yang berbeda. Sehingga dapat digunakan bahwa kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kepada 40 responden dengan waktu yang berbeda.

4.1.2.3 Uji MSI

Data yang didapatkan dari kuesioner merupakan data ordinal, sedangkan untuk menganalisis data diperlukan data interval, maka untuk memecahkan persoalan ini perlu ditingkatkan skala pengukurannya menjadi skala interval melalui uji MSI (*Method of Successive Interval).*

4.1.3 Analisis Verifikatif

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan output pada tabel 8 hal (21), menunjukkan bahwa hasil perhitungan menggunakan SPSS ditemukan hasil *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu sebesar 0,558, karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,558 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah berdistribusi normal, dan layak untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

b. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan output pada tabel 9 hal (22), diperoleh nilai *Tolerance* sebagai berikut:

1. Nilai Tolerance Kualitas SDM, 0,884 > 0,10
2. Nilai Tolerance SPI, 0,884 > 0,10

Adapun nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel:

1. VIF variabel Kualitas SDM, 1,131 < 10
2. VIF variabel SPI, 1,131 < 10

Dari output di atas maka dapat disimpulkan tidak terjadi persoalan multikolinieritas antar variabel bebas Kualitas SDM dan SPI.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan output pada tabel 10 hal (22), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai *sig. (2-tailed)* Kualitas SDM 0,190> 0,05.

2. Nilai *sig. (2-tailed)* SPI 0,574> 0,05.

Maka dapat disimpulkan bahwa data pada model regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas, sehingga data dapat digunakan untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

2. Persamaan Regresi Linier Berganda

Berdasarkan output dari tabel 11 hal (22), hasil perhitungan dapat diketahui koefisien-koefisien regresi pada penelitian ini, sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\textbf{Kualitas LKPD}_t = 1{,}090 + 0{,}311 * \textbf{Kualitas SDM}_t + 0{,}362 * \textbf{SPI}_t$$

Yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai koefisien pada variabel bebas menggambarkan besarnya perubahan variabel terikat jika variabel bebasnya berubah sebesar satu persen dengan syarat variabel bebas lainnya konstan *(ceteris paribus)*. Untuk persamaan di atas, apabila setiap peningkatan nilai Kualitas SDM sebesar satu persen maka SPI akan meningkat sebesar 0,311. Dan setiap peningkatan nilai SPI sebesar satu persen maka Kualitas LKPD akan meningkat sebesar 0,362.

b. Nilai konstanta α dapat diartikan bahwa jika Kualitas LKPD tidak dipengaruhi Kualitas SDM dan SPI, maka Kualitas LKPD adalah sebesar 1,090. Dari hasil tersebut dapat menunjukan adanya pengaruh Kualitas SDM dan SPI sebagai variabel *independent* (X_1 dan X_2) terhadap Kualitas LKPD sebagai variabel *dependent* (Y).

Nilai Kualitas LKPD yang diprediksi (Y') dapat dilihat pada tabel *Casewise Diagnostics* (kolom *Predicted Value*) (hal). Sedangkan Residual (*unstandardized residual*) adalah selisih antara kualitas LKPD dengan *Predicted Value*, dan Std. Residual (*standardized residual*) adalah nilai residual yang telah terstandarisasi (nilai semakin mendekati 0 maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi, sebaliknya semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau -1 maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi).

3. Analisis Korelasi Parsial

a. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan output pada tabel 12 hal (23), dapat diketahui hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ketika sistem pengendalian intern tidak berubah adalah sebesar 0,374 dengan arah positif, artinya kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan yang rendah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ketika sistem pengendalian intern tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika kualitas sumber daya manusia meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan ikut meningkat.

.

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan output pada tabel 13 hal (23), dapat diketahui hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ketika kualitas sumber daya manusia tidak berubah adalah sebesar 0,424 dengan arah positif, artinya sistem pengendalian intern memiliki hubungan yang sedang dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ketika kualitas sumber daya manusia tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika sistem pengendalian intern meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan ikut meningkat.

4. Analisis Koefisien Determinasi

a. Koefisien Determinasi Secara Parsial Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan ouput pada tabel 14 hal (23), dapat diketahui seberapa jauh kemampuan kualitas sumber daya manusia dalam menerangan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial dengan mengggunakan rumus:

$Kd = r^2 \times 100\%$

$Kd = (0{,}374)^2 \times 100\% = 13{,}98\%$

Dari hasil perhitungan di atas dengan melihat nilai koefisien determinasi (Kd) dapat dijelaskan bahwa variabel yang paling berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kualitas sumber daya manusia yaitu sebesar 13,98%.

b. Koefisien Determinasi Secara Parsial Sistem Pengendalian Intern Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan ouput pada tabel 15 hal (24), dapat diketahui seberapa jauh kemampuan sistem pengendalian intern dalam menerangan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial dengan mengggunakan rumus:

$Kd = r^2 \times 100\%$

$Kd = (0{,}424)^2 \times 100\% = 17{,}97\%$

Dari hasil perhitungan di atas dengan melihat nilai koefisien determinasi (Kd) dapat dijelaskan bahwa variabel yang paling berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern sebesar 17,97%.

5. Pengujian Hipotesis dan Pengambilan Keputusan

a. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel kualitas sumber daya manusia yaitu sebesar 2,453, sedangkan perhitungan dengan menggunakan bantuan *software* IBM SPSS v20.0 pada tabel 16 hal (24) sebesar 2,454 Sedangkan nilai t_{tabel} (2-tailed) sebesar 2,026. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan nilai t_{hitung} 2,454 > t_{tabel} 2,026 dan nilai t-sign 0,007< 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan gambar 1 hal (25), bahwa dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk variabel kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 2,454, yaitu berada pada daerah penolakan H_0, hal tersebut berarti bahwa kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel sistem pengendalian intern yaitu sebesar 2,849, sama halnya dengan perhitungan menggunakan bantuan *software* IBM SPSS v20.0 pada tabel 17 hal (24). Sedangkan nilai t_{tabel} (2-tailed) sebesar 2,026. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan nilai t_{hitung} 2,849 < t_{tabel} 2,026 dan nilai t-sign 0,007 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan gambar 2 hal (25), bahwa dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

yaitu sebesar 2,849, yaitu berada pada daerah penolakan H_0, hal tersebut berarti bahwa sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa kualitas sumber daya manusia pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 13,98% dan sisanya sebesar 86,02% dipengaruhi oleh faktor-faktor selain kualitas sumber daya manusia diantaranya teknologi informasi, pengelolaan keuangan daerah, dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain itu perhitungan dari koefisien korelasi menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan yang rendah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu sebesar 0,374 dengan arah positif. Dimana semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandung belum optimal, sehingga masih ada masalah mengenai pendidikan dimana masih minimnya pegawai yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan yaitu masih ada yang berlatarbelakang selain akuntansi. Dan masalah mengenai pelatihan dimana pegawai jarang mengikuti pelatihan karena pelaksanaan pelatihan tidak rutin.

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh menunjukan bahwa H_0 ditolak, atau kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang terlihat dari nilai t_{hitung} sebesar 2,454 dengan arah yang positif, yaitu lebih besar dari nilai t_{tabel}. Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Gede dan Ni Made (2012) menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pada laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Peneliti lainnya seperti Yosefrinaldi (2013) mengemukakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di mana, semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dan hasil penelitian sebelumnya dari Wiwik Andriani (2010) menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia secara signifikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Diharapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) perlu memberikan perhatian fokus terhadap kualitas sumber daya manusia dilakukan mengenai pendidikan yaitu meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawainya dalam bidang akuntansi. Dan mengenai pelatihan yaitu sering memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan akuntansi, misalnya dengan diselenggarakannya seminar. Sehingga kualitas sumber daya manusia dapat lebih ditingkatkan dan mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

4.2.2 Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 17,97% dan sisanya sebesar 82,03%

dipengaruhi oleh faktor-faktor selain sistem pengendalian intern diantaranya teknologi informasi, pengelolaan keuangan daerah, dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain itu perhitungan dari koefisien korelasi menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki hubungan yang sedang dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu sebesar 0,424 dengan arah positif. Dimana semakin tinggi sistem pengendalian intern, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandung belum memadai, sehingga masih ada masalah mengenai aset.

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh menunjukan bahwa H_0 ditolak, atau sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang terlihat dari nilai t_{hitung} sebesar 2,859 dengan arah yang positif, yaitu lebih besar dari nilai t_{tabel}. Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilawati (2014) menyimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 74.6%. Hal yang paling berpengaruh dalam peningkatan sistem pengendalian internal yaitu keandalan pelaporan. Tujuan pengendalian intern yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab laporan keuangan ini.

Penelitian lainnya seperti Gerry (2013) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Di mana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bukittinggi.

Dan menurut penelitian sebelumnya dari Tuti Herawati (2014) mengemukakan bahwa Secara parsial, terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Diharapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) perlu memberikan perhatian fokus terhadap sistem pengendalian intern dilakukan mengenai Lingkungan pengendalian dengan memperhatikan struktur organisasi dan memiliki prosedur yang efektif untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan, Penilaian Resiko dengan memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi terhadap resiko yang dapat menghambat pembuatan laporan keuangan, Aktivitas pengendalian dengan menetapkan dan mengkomunikasikan rencana kebijakan dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai dan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian harus tidak dikendalikan oleh satu orang, Informasi dan komunikasi dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan, dan Pengawasan sebaiknya aparat pengawasan hendaknya lebih efektif dalam melakukan pembinaan seperti melakukan kontrol secara rutin.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD), artinya semakin baik kualitas sumber daya

manusia, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi yaitu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang masih opini WDP terjadi karena minimnya sumber daya manusia.

2. Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD), maka semakin baik sistem pengendalian intern, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi yaitu, sistem pengendalian intern yang belum memadai yang berimplikasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian membantu pihak yang terkait dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dan dapat disampaikan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) perlu memberikan perhatian fokus terhadap kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan:
    1) Pendidikan, meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawainya dalam bidang akuntansi sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
    2) Pelatihan, sering memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan akuntansi, misalnya dengan diselenggarakannya seminar. Sehingga kualitas sumber daya manusia dapat lebih ditingkatkan dan mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
2. Sistem pengendalian intern berpangaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) perlu memberikan perhatian fokus terhadap sistem pengendalian intern dilakukan dengan:
    1) Lingkungan pengendalian, dengan memperhatikan struktur organisasi dan memiliki prosedur yang efektif untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan.
    2) Penilaian Resiko, memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi terhadap resiko yang dapat menghambat pembuatan laporan keuangan.
    3) Aktivitas pengendalian, menetapkan dan mengkomunikasikan rencana kebijakan dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai dan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian harus tidak dikendalikan oleh satu orang.
    4) Informasi dan komunikasi, dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan.
    5) Pengawasan, sebaiknya aparat pengawasan hendaknya lebih efektif dalam melakukan pembinaan seperti melakukan control secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.

Andi Supangat. 2007. *Statistik: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan. Nonparametrik*. Jakarta: Kencana.

Arens, Alvin A. James L. Loebbecke. 2008. *Auditing Pendekatan Terpadu,* Terjemahan oleh Amir Abadi Yusuf, Buku Dua, Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Barker, Chris., Pistrang, Nancy., & Elliot, Robert. 2002. *Research Methods in Clinical Psychology 2nd Ed*. John Wiley & Sons: LTD Chicester England.

Dadang Suwanda. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: PPM.

Febriady Leonard Sembiring. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 1 2013.

Gerry Armando. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No.1 (2013): Seri C.

Gujarati N. Damodar. 2004. *Basic Econometrics fourth edition*. McGraw-Hill.

I Gede dan Ni Made. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 1, No. 1, November 2012.

Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

_____. 2010. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Sekar Mayangsari dan Puspa Wandanarum. 2013. *Pendekatan Sektor Publik dan Privat, Buku 1*. Jakarta: Media Bangsa.

Soekidjo Notoatmodjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sofyan Syafri Harahap. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sony Sumarsono. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogjakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

_____. 2008. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

_____. 2009. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

_____. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta

Susilawati dan Dwi Seftihani. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *STAR-Study & Accounting Research*. Vol. XI, No. 1 – 2014 ISSN: 1693-4482

Tangkilisan, Nogi S. Hessel. 2005. *Manajemen Publik.* Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Tuti Herawati. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Star-Study & Accounting Research* Vol Xi No 1 2014 ISSN: 1693-4482.

Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati, S.D. Anggadini, & L. Ismawati. 2010. *Penilisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi: Genesis.

Teguh Wahyono. 2004. *Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wiwik Andriani. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen.* Vol. 5 No. 1 2010.

Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi.* Vol. 1 No. 1 2013.

LAMPIRAN

Tabel 1
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1)

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %	Kategori
1	Pendidikan	598	800	74,80%	Baik
2	Pelatihan	892	1000	89,10%	Sangat Baik
Total		**1490**	**1800**	**81,95%**	**Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2014

Tabel 2
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Pengendalian Intern (X_2)

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %	Kategori
1	Lingkungan Pengendalian	424	600	70,67%	Baik
2	Penilaian Resiko	141	200	70,50%	Baik
3	Aktivitas Pengendalian	555	800	69,40%	Baik
4	Informasi dan Komunikasi	182	200	91%	Sangat Baik
5	Pengawasan	184	200	92%	Sangat Baik
	Total	**1486**	**2000**	**78,71%**	**Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2014

Tabel 3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %	Kategori
1	Relevan	502	600	83,67%	Baik
2	Andal	500	600	83,33%	Baik
3	Dapat Dibandingkan	361	400	90,25%	Sangat Baik
4	Dapat Dipahami	315	400	79%	Baik
	Total	**1678**	**2000**	**84,06%**	**Sangat Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2014

Tabel 4
Uji Validitas Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)

Correlations

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Kualitas SDM	,641	,563	,783	,583	,512	,596	,607	,456	,678	,558
	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,003	,000	,000
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Tabel 5
Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern (X2)

Correlations

	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
Sistem Pengendalian Intern	,636	,683	,706	,591	,520	,577	,588	,667	,549	,505
	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,001
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Tabel 6
Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Correlations

	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30
Kualitas LKPD	,533	,502	,638	,699	,633	,569	,495	,688	,662	,699
	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Tabel 7
Hasil Perhitungan Koefisien Reabilitas

Variabel	Koefisien Reabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,804	0,700	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,792	0,700	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,819	0,700	Reliabel

Sumber: Lampiran Uji Reabilitas

Tabel 8
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,38299623
Most Extreme Differences	Absolute	,125
	Positive	,075
	Negative	-,125
Kolmogorov-Smirnov Z		,792
Asymp. Sig. (2-tailed)		,558

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 9
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kualitas SDM	,884	1,131
	SPI	,884	1,131

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Tabel 10
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Correlations

			Kualitas SDM	SPI	ABS_RES
Spearman's rho	Kualitas SDM	Correlation Coefficient	1,000	,311	,212
		Sig. (2-tailed)	.	,051	,190
		N	40	40	40
	SPI	Correlation Coefficient	,311	1,000	-,092
		Sig. (2-tailed)	,051	.	,574
		N	40	40	40
	ABS_RES	Correlation Coefficient	,212	-,092	1,000
		Sig. (2-tailed)	,190	,574	.
		N	40	40	40

Tabel 11
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1,090	,380	
	Kualitas SDM	,311	,127	,342
	SPI	,362	,127	,397

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Tabel 12
Korelasi Parsial Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Correlations

Control Variables			Kualitas SDM	Kualitas LKPD
SPI	Kualitas SDM	Correlation	1,000	,374
		Significance (2-tailed)	.	,019
		df	0	37
	Kualitas LKPD	Correlation	,374	1,000
		Significance (2-tailed)	,019	.
		df	37	0

Tabel 13
Korelasi Parsial Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Correlations

Control Variables			SPI	Kualitas LKPD
Kualitas SDM	SPI	Correlation	1,000	,424
		Significance (2-tailed)	.	,007
		df	0	37
	Kualitas LKPD	Correlation	,424	1,000
		Significance (2-tailed)	,007	.
		df	37	0

Tabel 14
Statistik SPSS Koefisien Determinasi Parsial X_1

Correlations

Control Variables			Kualitas SDM	Kualitas LKPD
SPI	Kualitas SDM	Correlation	1,000	,374
		Significance (2-tailed)	.	,019
		df	0	37
	Kualitas LKPD	Correlation	,374	1,000
		Significance (2-tailed)	,019	.
		df	37	0

Tabel 15
Statistik SPSS Koefisien Determinasi Parsial X_2

Correlations

Control Variables			SPI	Kualitas LKPD
Kualitas SDM	SPI	Correlation	1,000	,424
		Significance (2-tailed)	.	,007
		df	0	37
	Kualitas LKPD	Correlation	,424	1,000
		Significance (2-tailed)	,007	.
		df	37	0

Tabel 16
Hasil Pengujian Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Parsial (Uji Statistik t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,090	,380		2,865	,007
	Kualitas SDM	,311	,127	,342	2,454	,019
	SPI	,362	,127	,397	2,849	,007

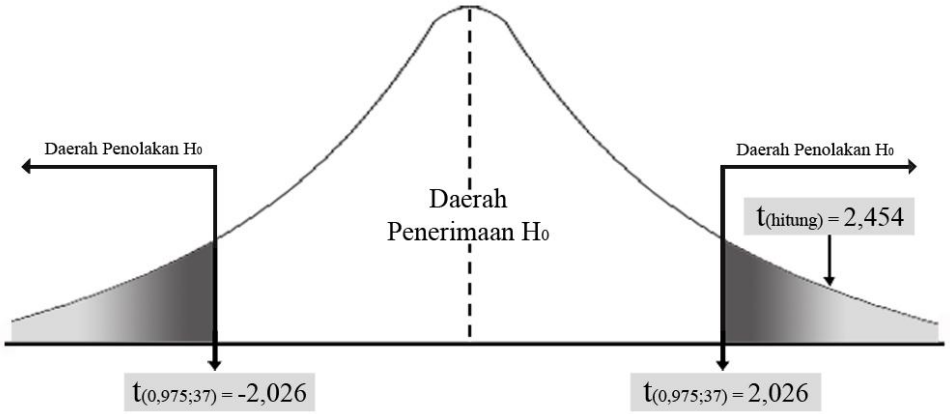
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Tabel 17
Hasil Pengujian Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Parsial (Uji Statistik t)

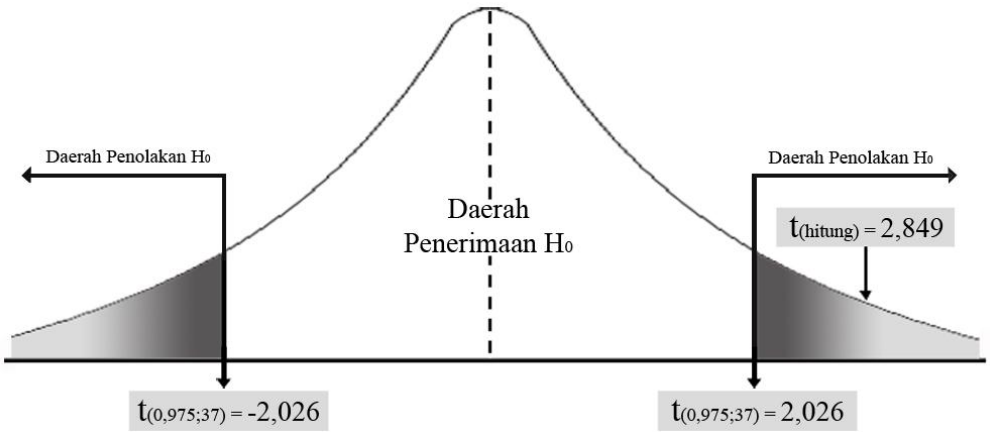
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,090	,380		2,865	,007
	Kualitas SDM	,311	,127	,342	2,454	,019
	SPI	,362	,127	,397	2,849	,007

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD



Gambar 1
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 pada Hasil Pengujian Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Parsial (Uji Statistik t)



Gambar 2
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 pada Hasil Pengujian Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Parsial (Uji Statistik t)